



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 7505238 Fax. 0370-7505238, 622928

website : www.dpu.ntbprov.go.id e-mail : dpu@ntbprov.go.id

M A T A R A M 8 3 1 1 5

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 01.1 / KPTS/ DPUPR/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi PPID Utama Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu oleh PPIDP yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penunjukan PPIDP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang;
8. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);
18. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 termasuk didalamnya Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Setiap Saat, Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala, dan Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta.

: Provinsi Nusa Tenggara Barat telah tersedia dan diumumkan pada website dpu.ntbprov.go.id situs resmi Dinas PUPR Provinsi NTB.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ir. Hj. Lies Nurkomalasari, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670715 199803 2 003

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Pembina PPID Utama Provinsi NTB di Mataram;
2. Sekretaris Daerah Provinsi NTB selaku Atasan PPID Utama Provinsi NTB di Mataram;
3. Ketua PPID Utama Provinsi NTB di Mataram;
4. Unit Kerja/Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB masing-masing di tempat;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 01.1 / KPTS/ DPUPR/2025
TANGGAL : 03 Januari 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DITETAPKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai	PJ Pembuatan / Penyerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip
1	Alamat OPD	Sub Bag. Umum	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
2	Visi & Misi OPD	Program	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
3	Tugas & Fungsi OPD	Program	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
4	Struktur Organisasi OPD	Sub Bag. Umum	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
5	Estatet Kepemimpinan	Sub Bag. Umum	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
6	Riwayat Singkat Pimpinan	Sub Bag. Umum	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
7	Sumber Daya Manusia	Sub Bag. Umum	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
8	Informasi Umum Program Strategis	Program	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
9	Informasi terkait Pemohonan Informasi dan Keberatan	Sekretariat PPID	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID

K:\PRODUCTION\EXPORT\Doc 2018.docx | Page: 2 of 1 | 10:44

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai	Pj Pembuatan / Penelibitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip
Informasi ttg Peraturan,						
22	Keputusan dan/atau Kebijakan OPD	Bina Marga	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
23	Anggaran OPD secara Umum	Program	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
24	Rencana Kerja Anggaran	Program	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
25	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Program	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
26	Agenda Pimpinan	Sekretaris Kadis	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
27	Kalender Kegiatan	Program	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
28	LKPI	Program	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
29	Laporan Keuangan	Sub Bag. Keuangan	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
30	LKIP	Program	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
31	Laporan Layanan Informasi Publik	Sekretariat PPID	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
32	Rencana Kerja	Program	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
33	Rencana Strategis	Program	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
34	Statistik Kepegawaian	Sub Bag. Umum	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai	PJ Pembuatan / Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip
35	Statistik Keuangan	Sub Bag. Keuangan	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
36	Laporan Tahunan OPD	Program	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
37	LHKPN Pejabat	Sub Bag. Umum	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
38	IKU, PK, RKT, RA	Program	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
39	Realisasi Anggaran dan Kinerja	Program	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
40	Pedoman Layanan Publik dan Perkantoran	Sekretariat PPID	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
41	Analisis Harga Satuan Pekerjaan	Bidang/Balai	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
42	SSH	Bidang/Balai	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai	PJ Pembuatan / Penyerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip
43	Informasi Umum Pengadaan Barang & Jasa	Bidang/Balai	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
44	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak	Sekretariat PPID	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
45	Waktu Pelayanan Informasi	Sekretariat PPID	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID
46	Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat	Sekretariat PPID	Sekretaris	2025	Softcopy	Selama Berlaku dan Disetujui Ketua PPID

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Lies Murkomalasari, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670715 199803 2 003